

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten atau Kota telah dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk membangun daerahnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Lembata juga merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Lembata dituntut untuk mampu mengurus dan membiayai kegiatan pemerintah daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparansi, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Kabupaten Lembata memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan pendapatan daerah yaitu :1.) PAD yang terdiri dari pajak

daerah , Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain lain pendapatan daerah yang sah. 2.) Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi.

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara, dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah.

Rondonuwu dkk. (2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat(Purba, 2022). Halim dan Kusufi (2016:31) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan(Antari & Sedana, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal (1) ayat (14) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan 1 desember.

APBD yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan memiliki fungsi penting bagi pemerintah diantaranya yaitu: sebagai sarana dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada pemerintah, sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah, sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakatnya atas segala kegiatan dan hasil kerja pemerintah selama periode tertentu, sebagai sarana untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan atau pertumbuhan daerahnya pada setiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahunan berikutnya, dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan publik.

Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata memerlukan pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis transparan dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik yang akan meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai gambaran awal mengenai APBD, disajikan data APBD Pemerintah Kabupaten Lembata dari tahun 2019- 2022. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1

## Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata

	2019			2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>93.433.000.000</b>	<b>91.233.000.000</b>	<b>97,65</b>	<b>621.089.000.000</b>	<b>541.994.000.000</b>	<b>87,27</b>	<b>85.807.000.000</b>	<b>78.665.000.000</b>	<b>91,68</b>	<b>83.014.000.000</b>	<b>90.711.000.000</b>	<b>109,27</b>
PAD	7.428.000.000	5.172.000.000	69,72	158.886.000.000	116.657.000.000	73,42	10.000.000.000	3.814.000.000	38,14	158.886.000.000	4.004.000.000	73,07
Pendapatan Transfer	83.205.000.000	82.513.000.000	99,17	452.153.000.000	417.136.000.000	92,25	74.170.000.000	71.849.000.000	96,87	452.183.000.000	83.298.000.000	115,13
Pendapatan lainnya	2.810.000.000	3.548.000.000	126,28	10.020.000.000	8.200.000.000	81,84	3.448.000.000	3.002.000.000	87,06	10.020.000.000	3.409.000.000	65,73
<b>Belanja daerah</b>	<b>96.683.000.000</b>	<b>92.467.000.000</b>	<b>95,83</b>	<b>682.478.000.000</b>	<b>575.526.000.000</b>	<b>84,33</b>	<b>90.541.000.000</b>	<b>80.016.000.000</b>	<b>88,38</b>	<b>682.478.000.000</b>	<b>102.474.000.000</b>	<b>96,21</b>
Belanja pegawai	36.764.000.000	28.867.000.000	78,52	183.440.000.000	144.465.000.000	78,75	32.672.000.000	30.251.000.000	92,59	183.440.000.000	30.041.000.000	89,28
Belanjabarangdan jasa	16.028.000.000	23.246.000.000	145,04	131.972.000.000	122.157.000.000	92,56	20.069.000.000	16.626.000.000	82,85	131.972.000.000	16.270.000.000	85,36
Belanja modal	24.863.000.000	21.408.000.000	86,10	157.438.000.000	102.679.000.000	65,22	16.822.000.000	12.742.000.000	75,75	157.438.000.000	24.572.000.000	72,17
Belanja lainnya	19.029.000.000	19.126.000.000	100,51	209.628.000.000	206.255.000.000	98,38	20.978.000	20.397.000.000	97,23	209.628.000.000	31.592.000.000	159,87
Belanja Bunga	0,0	0,0	0	54.000.000.000	5.880.000.000	10,88	-	-	-	6.290.000.000	5.200.000.000	82,61
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Belanja Hibah	1.680.000.000	2.110.000.000	125,48	146.486.000.000	132.933.000.000	90,75	5.662.000.000	4.520.000.000	80,51	2.380.000.000	4.860.000.000	203,23
Bantuan Sosial	350.000.000	870.000.000	249,86	44.270.000.000	20.970.000.000	47,57	16.200.000.000	7.600.000.000	46,86	10.360.000.000	8.890.000.000	85,88
Belanja tidak terduga	2.000.000.000	230.000.000	11,71	5.000.000.000	240.940.000.000	4.818,78	5.580.000.000	11.250.000.000	191,20	8.530.000.000	4.440.000.000	52,01
Belanja bagi hasil	3.114.000.000	2.140.000.000	68,13	523.140.000.000	460.140.000.000	87,96	0,00	2.770.000.000	0	1.360.000.000	1.090.000.000	80,00
Belanja bantuan keuangan	183.110.000.000	185.900.000.000	101,52	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00	182.070.000.000	177.830.000.000	97,67	186.680.000.000	291.430.000.000	172,77
<b>Pembiayaan daerah</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>3.811.000.000</b>	<b>117,25</b>	<b>61.389.000.000</b>	<b>40.371.000.000</b>	<b>65,76</b>	<b>2.923.000.000</b>	<b>1.884.000.000</b>	<b>64,44</b>	<b>61.389.000.000</b>	<b>21.290.000.000</b>	<b>90,60</b>
Penerimaan pembiayaan	3.500.000.000	4.061.000.000	116,02	64.089.000.000	43.071.000.000	67,20	3.173.000.000	2.134.000.000	67,25	64.089.000.000	21.790.000.000	90,79
Penegeluaran pembiayaan	250.000.000	250.000.000	100,00	2.700.000.000	2.700.000.000	100,00	250.000.000	250.000.000	100,00	2.700.000.000	500.000.000	100,00
<b>Surplus/defisit</b>	<b>-3.250.000.000</b>	<b>-1.414.000.000</b>	<b>43,54</b>	<b>-61.389.000.000</b>	<b>-33.532.000.000</b>	<b>54,62</b>	<b>-2.923.000.000</b>	<b>-1.351.000.000</b>	<b>46,22</b>	<b>-61.389.000.000</b>	<b>-11.763.000.000</b>	<b>50,06</b>

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan Kab. Lembata

Berdasarkan tabel 1.1 di atas kinerja keuangan Kabuapten Lembata Pada tahun 2019 dilihat dari Pendapatan Daerah sebesar 97,65%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 87,27% yang diakibatkan oleh covid-19 yang berdampak terhadap pemerintah daerah khususnya dari retribusi maupun potensi PAD karena beberapa objek pajak mengalami penurunan usaha seperti usaha kuliner yang berimbas ke sektor usaha parkir sehingga pendapatan parkir juga sedikit, aktivitas perekonomian masyarakat juga menurun yang berdampak pada pendapatan daerah, pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 91,68% dan 109,27% ini di akibatkan pada tahun 2022, sudah memulai aktivitas seperti biasa yang di lakukam oleh masyarakat, dan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat sudah mulai meningkat.

Selanjutnya ditinjau dari aspek belanja daerah dilihat dari tahun 2019 sampai 2022 pendapatan daerah yang dianggarkan ataupun yang terealisasi lebih kecil dari belanja daerah sehingga tidak mampu membiayai pembiayaan-pembiayaan sehingga terjadinya defisit, untuk menutupi itu pemerintah daerah Kabupaten Lembata melakukan pinjaman atau hutang daerah. Dibuktikan dengan penelitian sebelumnya Rosadi & Saputra (2017) yang mengatakan Defisit Anggaran dapat terjadi oleh suatu pengeluaran apabila pengeluaran yang berlebihan daripada penerimaan. Anggaran Defisit ini ditutupi dengan cara salah satunya utang luar negeri atau menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya(Ulum & Gisela Syaputri, 2021).

Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam hal kinerja. Hal yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return of investemnt*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintahan tidak ada "*Net Profit*". Analisis rasio keuangan pada pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang di capai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan menggunakan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lainnya.

Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD dan rasio pemerintah daerah lainnya antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi PAD, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD, Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD, dan Rasio Lain-lain PAD yang Sah. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019-2022"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019-2022”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis baik secara praktis maupun teoritis tentang kinerja pemerintah daerah.

### 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lembata

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal gambaran penyusunan kinerja keuangan.

### 3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan.